



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURPIAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 443145

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 588.000.000**

1. Tanah Seluas 228 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 228 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 475 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/119 m2 di KOTA PONTIANAK, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 174.260.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA ACF1L21B06 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 22.760.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 77.200.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	207.545.239
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.047.005.239
III. HUTANG	Rp.	61.298.466
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	985.706.773

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.